



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEREMPUAN TERJERAT PRAKTIK PINJAMAN ONLINE

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Akhir-akhir ini fenomena masyarakat yang terjerat pinjaman *online* (pinjol) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama pada kelompok perempuan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan periode Januari 2025 menunjukkan jumlah nasabah perempuan dalam layanan pinjol mencapai 11.7 juta orang, lebih tinggi dari jumlah nasabah laki-laki yang berjumlah 11,5 juta orang. Nilai pinjaman yang diajukan perempuan pun lebih tinggi, sebesar Rp39,8 triliun, sementara laki-laki Rp34,2 triliun. Kesenjangan ini telah terjadi sejak tahun 2022. Situasi ini dapat memunculkan risiko, terutama jika dilihat dari sisi kelancaran pembayaran angsuran. Hal ini terbukti dari angsuran yang tidak lancar (tunggakan lebih dari 30 hari), kelompok nasabah perempuan terhitung lebih tinggi dibandingkan nasabah laki-laki.

Data lain dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat selama 2018–2024 lembaga ini telah menerima 1.944 aduan dari korban pinjol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) maupun luar Jabodetabek. Sebanyak 1.208 orang atau 62,14 persen korban berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya, 734 orang atau 37,76 persen korban berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan alasan utama perempuan pengguna jasa pinjol menurut data dari riset Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2022 yaitu kebutuhan keluarga, kebutuhan konsumtif pribadi, dan membuka usaha.

Merespons fenomena ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan prihatin dengan banyaknya perempuan yang terjerat praktik pinjol, khususnya pada kasus perempuan yang menjadi kepala keluarga. Fenomena ini tak hanya mengancam ketahanan keluarga, tetapi juga menunjukkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap layanan keuangan yang aman. Untuk itu, Ketua DPR RI meminta pemerintah memperketat aturan mengenai pinjol sehingga mampu melindungi kaum perempuan dari ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Pinjol menjadi pilihan perempuan untuk mendapatkan dana karena pengajuan pinjol sangat cepat dan tidak memerlukan persyaratan berat. Banyak perempuan yang tidak tahu bahwa skema pembayaran tagihan di pinjol adalah bunga berbunga sehingga jumlah utang dapat berlipat-lipat dari pinjaman pokoknya. Pinjaman yang terlihat seperti memberikan pertolongan darurat pada masyarakat, pada akhirnya menjerumuskan peminjamnya pada jeratan utang yang tidak berujung.

Sebagian besar perempuan dalam konteks rumah tangga di Indonesia memegang peran sebagai pengelola keuangan keluarga. Ketika kebutuhan mendesak muncul, seperti biaya sekolah anak, biaya berobat, dan kebutuhan konsumsi harian, kaum perempuan harus mencari solusi cepat. Dalam kondisi ini, pinjol menjadi solusi atau jalan pintas yang menggoda dengan proses cepat, minim verifikasi, bahkan tanpa jaminan dan agunan. Namun, solusi instan ini seringkali menjadi bumerang. Dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tenor pendek, pinjol pada akhirnya menjerumuskan perempuan dalam jeratan siklus utang yang sulit diputus.

Minimnya literasi keuangan menempatkan perempuan pada posisi berisiko menjadi korban dari praktik pinjol. Nilai tunggakan pinjol pada perempuan yang relatif tinggi menunjukkan perlunya edukasi finansial dan literasi digital yang intensif, terutama untuk kelompok perempuan pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu, ke depan perlu adanya edukasi yang masif terkait literasi keuangan, khususnya kepada perempuan sehingga pengetahuan tersebut akan membantu mereka mengelola keuangan secara bijak, meningkatkan kemandirian finansial, dan mengurangi ketimpangan gender dalam hal keuangan. Dengan literasi keuangan, perempuan dapat membuat keputusan keuangan yang tepat, mengelola risiko, dan membangun keamanan finansial jangka panjang.

Atensi DPR

Perempuan merupakan salah satu pilar ketahanan keluarga, termasuk ketahanan keuangan sehingga perlu memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan serta memiliki literasi keuangan yang memadai. Jasa pinjol yang sekilas menawarkan solusi secara cepat kepada perempuan, pada akhirnya justru dapat merugikan peminjamnya karena skema yang dapat berubah menjadi bunga berbunga. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk secara aktif memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada perempuan. Edukasi dan literasi keuangan diperlukan agar perempuan mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat, mengelola risiko, dan membangun keamanan finansial jangka panjang, termasuk agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjol.

Sumber

detik.com, 28 April 2025;
katadata.co.id, 29 April 2025;
kompas.com, 28 dan 30 April 2025;
kompas.co.id, 29 April 2025;
liputan6.com, 30 April 2025; dan
riaualtural.com, 2 Mei 2025.

Minggu ke-1 Mei
(28 April s.d. 4 Mei 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*